

Fiscal Policy during the Prophet Muhammad's Era and Its Relevance to Modern Fiscal Policy: A Case Study of BAZNAS South Tapanuli

Leily Wahyuni Harahap¹, Dina Chairunnisa², Sarmiana Batubara³

¹ UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

² UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

³ UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

***Corresponding Author:**

leilywhrp@gmail.com

dinac972@gmail.com

syarmabatubara@yahoo.com

Article History:

Received 2026-01-06

Revised 2026-01-07

Accepted 2026-01-07

Keywords:

Islamic Fiscal Policy, Rasulullah SAW, Productive Zakat, BAZNAS, Social Welfare.

Abstract

Fiscal policy in Islamic economics is not merely oriented toward efficiency in public finance management but is fundamentally grounded in the principles of justice, public welfare, and equitable distribution. These principles were systematically implemented during the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) through fiscal instruments such as zakat, ushr, kharaj, jizyah, fai', and ghanimah, which functioned as tools for redistribution and economic stabilization. This study aims to examine fiscal policy during the Prophet's era and assess its relevance to contemporary fiscal practices through a case study of BAZNAS South Tapanuli. Employing a qualitative approach, this research integrates library research with a case study method, using interviews, field observations, and institutional document analysis. The findings indicate that zakat management at BAZNAS South Tapanuli represents an adaptation of Islamic fiscal principles through decentralized collection mechanisms, digital payment systems, and a productive zakat distribution model oriented toward mustahik empowerment. Nevertheless, the effectiveness of modern Islamic fiscal policy remains constrained by limited public zakat compliance and the absence of systematic post-distribution impact evaluation.

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal Islam, Rasulullah SAW, Zakat Produktif, BAZNAS, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstrak

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara sistematis pada masa Rasulullah SAW melalui instrumen fiskal seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah yang berfungsi sebagai alat redistribusi dan stabilisasi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta relevansinya terhadap praktik kebijakan fiskal modern melalui studi kasus BAZNAS Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus, melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan merepresentasikan adaptasi prinsip fiskal Islam melalui mekanisme pengumpulan berbasis UPZ dan digitalisasi, serta distribusi zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal modern masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran zakat dan keterbatasan evaluasi dampak kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan untuk efisiensi distribusi sumber daya, tetapi juga mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (al-māl al-islāmī) sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi masyarakat (Saini & Zaenol, 2024). Zakat berfungsi sebagai mekanisme fiskal yang responsif terhadap kebutuhan mustahik, dengan memastikan bahwa setiap individu membayar kewajiban sesuai kemampuan ekonominya, sementara masyarakat miskin

menerima bantuan yang sesuai, sebagaimana terlihat pada praktik zakat produktif saat ini (Firmansyah et al., 2024).

Prinsip redistribusi berbasis kebutuhan (*need-based*) ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat, ushr, kharaj, fai', ghanimah, dan jizyah. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk menjamin distribusi tepat sasaran, sehingga kebijakan fiskal Islam awal tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga stabilisator ekonomi yang menjaga keseimbangan masyarakat (Syamsu et al., 2025).

Di era modern, prinsip-prinsip ini diadaptasi oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Tapanuli Selatan, yang mengimplementasikan sistem pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, pemotongan gaji ASN, serta penggunaan QRIS untuk zakat, infaq, dan sedekah. Penyaluran bantuan kini difokuskan pada program produktif dengan Mekanisme verifikasi mustahik menggunakan data dari BPS, PKH, dan Dinas Sosial, kemudian diverifikasi kembali oleh UPZ sebelum penyaluran (Putri et al., 2025)

Pendekatan ini menekankan integrasi prinsip *need-based* dan *legal-formal*, di mana distribusi zakat dilakukan secara terstruktur namun tetap berfokus pada penerima yang membutuhkan. Pengawasan dan akuntabilitas modern dilakukan melalui tanda terima resmi, publikasi media sosial, serta audit internal dan eksternal. Meskipun demikian, efektivitas distribusi jangka panjang masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat, minimnya evaluasi pasca-penyaluran, dan karakter masyarakat yang lebih takut sanksi pajak daripada kewajiban zakat (Zakiya & Hakim, 2025)

Beberapa penelitian menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan menurunkan ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif. Hal ini sejalan dengan prinsip fiskal Rasulullah SAW, yang menekankan distribusi transformasional untuk mengubah penerima menjadi pemberi, sekaligus menjaga perputaran ekonomi di masyarakat (Wulandari et al., 2025).

Dengan demikian, praktik fiskal modern di BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan adaptasi prinsip historis yang mempertahankan stabilisasi ekonomi, redistribusi, dan pemberdayaan mustahik, namun dikemas dalam mekanisme digital, akuntabel, dan terstruktur.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan relevansinya dengan praktik fiskal modern di Indonesia, khususnya melalui peran BAZNAS Tapanuli Selatan. Fokus penelitian meliputi prinsip fiskal Islam (keadilan, kemaslahatan, pemerataan), integrasi instrumen zakat dalam mekanisme modern seperti UPZ, pemotongan gaji ASN, dan QRIS, serta peran BAZNAS dalam distribusi zakat produktif berbasis data dan verifikasi lapangan. Pendekatan ini menggabungkan telaah normatif, historis, dan data wawancara, sehingga diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan fiskal Islam yang inklusif, akuntabel, dan memberdayakan masyarakat.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Peacock, 2020). Alam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pengumpulan sumber daya, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan, sehingga setiap individu dikenai kewajiban sesuai kemampuan, dan masyarakat miskin memperoleh haknya melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, kharaj, dan fai' (Sulaiman, 2008). Kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, alat redistribusi kekayaan, dan penopang keberlangsungan

negara, di mana mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pengawasan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab (Syamsu et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta relevansinya terhadap kebijakan fiskal modern, khususnya dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik inferensial (Tracy, n.d.19). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena kebijakan yang sarat dengan nilai, konteks historis, dan praktik kelembagaan (Aspers & Corte, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah konsep dan prinsip kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW berdasarkan sumber-sumber normatif dan historis. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk menganalisis secara kontekstual implementasi dan relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal modern di BAZNAS Tapanuli Selatan (Yin, 2023).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah sumber normatif. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ketua BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai informan kunci, mengingat posisinya yang memiliki kewenangan dan pengetahuan menyeluruh terkait mekanisme pemungutan, pendistribusian, serta pengawasan zakat sebagai instrumen fiskal Islam di tingkat daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai sistem pengumpulan zakat, program pendayagunaan produktif, transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta tantangan fiskal yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas kelembagaan BAZNAS, termasuk mekanisme kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penggunaan sistem digital seperti QRIS, serta proses verifikasi dan penyaluran zakat kepada mustahik. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian (Aini et al., 2023).

Data primer normatif meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Islam, seperti zakat, infak, sedekah, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah, serta praktik pengelolaan Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Data sekunder meliputi buku sejarah ekonomi Islam, literatur fikih siyasah dan fikih zakat, dokumen publik dan laporan resmi BAZNAS, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal modern. Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengklasifikasian sumber berdasarkan kredibilitas, relevansi substansi, dan keterkinian publikasi (Kitchenham et al., 2010).

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan zakat, pendistribusian dana, transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan empiris tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep dan praktik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan argumentatif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian dan relevansi prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dalam praktik kelembagaan kontemporer, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam optimalisasi fungsi fiskal zakat di era modern (Kitchenham et al., 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL MODERN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan mekanisme pengumpulan zakat yang bersifat terdesentralisasi dan berbasis teknologi, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di setiap kecamatan, pemotongan langsung gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Pola ini menunjukkan adaptasi instrumen fiskal Islam ke dalam konteks tata kelola modern yang menekankan efisiensi, kemudahan akses, dan perluasan basis penghimpunan.

Penggunaan UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS memiliki kemiripan dengan praktik pengangkatan amil zakat pada masa Rasulullah SAW, di mana petugas zakat diutus langsung untuk melakukan pemungutan di wilayah tertentu. Kesamaan ini menunjukkan bahwa prinsip delegasi fiskal dan kedekatan institusional dengan masyarakat tetap dipertahankan, meskipun dalam format kelembagaan yang lebih formal. Sementara itu, penerapan QRIS mencerminkan inovasi fiskal modern yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena hanya berfungsi sebagai sarana teknis, bukan penentu substansi kewajiban zakat.

Namun demikian, hasil wawancara mengungkap bahwa tantangan utama dalam pengumpulan zakat bukan terletak pada sistem, melainkan pada rendahnya kesadaran masyarakat. Ketua BAZNAS Tapanuli Selatan menyatakan bahwa masyarakat cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak dibandingkan zakat. Temuan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan masa Rasulullah SAW, di mana kepatuhan fiskal bersifat normatif-religius dan tidak bergantung pada sanksi koersif. Dengan demikian, secara fungsional BAZNAS telah mengadopsi mekanisme fiskal modern, tetapi secara sosiologis belum sepenuhnya didukung oleh internalisasi nilai zakat sebagai kewajiban kolektif.

POLA DISTRIBUSI ZAKAT: DARI KONSUMTIF KE PRODUKTIF

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma distribusi zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan, dari pola konsumtif menuju pola produktif. Berdasarkan kebijakan BAZNAS pusat, alokasi dana zakat, infak, dan sedekah diarahkan sebesar 70% untuk sektor produktif dan 30% untuk sektor konsumtif. Distribusi produktif difokuskan pada pemberdayaan pelaku usaha mikro dan masyarakat miskin potensial agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan keluar dari status mustahik.

Pola distribusi ini memiliki relevansi kuat dengan praktik kebijakan fiskal Rasulullah SAW yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformasional. Pada masa Rasulullah, zakat dan harta publik digunakan untuk memberikan modal usaha, tanah, dan sarana produksi kepada kelompok miskin agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan skema bantuan modal usaha tanpa bunga dan tanpa penalti, yang dikembalikan sesuai kemampuan penerima. Skema ini mencerminkan prinsip non-riba, solidaritas sosial, dan keberlanjutan dana zakat sebagaimana diterapkan dalam sistem fiskal Islam awal. Distribusi konsumtif tetap dipertahankan untuk kebutuhan mendesak, seperti bantuan pendidikan dan bantuan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal modern yang dijalankan BAZNAS bersifat fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan prinsip masalah dalam kebijakan fiskal Islam.

MEKANISME VERIFIKASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan mekanisme verifikasi mustahik yang relatif ketat melalui integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Program Keluarga

Harapan (PKH), dan Dinas Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi ulang oleh UPZ dan tim BAZNAS melalui survei lapangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran dan menghindari kesalahan alokasi.

Jika dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW, mekanisme verifikasi ini merupakan bentuk modernisasi dari verifikasi sosial yang dahulu dilakukan secara langsung melalui pengetahuan kolektif masyarakat dan pengawasan sahabat. Meskipun pendekatannya berbeda, tujuan dasarnya tetap sama, yaitu menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan harta publik.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS menerapkan sistem administrasi formal berupa tanda terima, dokumentasi penyaluran, publikasi melalui media sosial, serta pengawasan internal dan eksternal. Praktik ini menunjukkan upaya institusional untuk menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, transparansi merupakan elemen kunci yang juga ditegakkan Rasulullah SAW melalui pelaporan terbuka dan pengawasan langsung terhadap amil zakat.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun mekanisme akuntabilitas administratif sudah berjalan, evaluasi dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik belum dilakukan secara sistematis. Hal ini berbeda dengan masa Rasulullah SAW, di mana perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diamati secara langsung dan menjadi indikator keberhasilan kebijakan fiskal.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan BAZNAS Tapanuli Selatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program zakat produktif. Skema bantuan modal usaha tanpa bunga memberikan ruang bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kebijakan fiskal Islam sebagai alat redistribusi dan stabilisasi ekonomi.

Namun efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, belum adanya sistem evaluasi pasca-penyaluran membuat dampak jangka panjang sulit diukur secara empiris. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat membatasi kapasitas fiskal BAZNAS untuk memperluas jangkauan program. Ketiga, birokratisasi yang tidak terhindarkan dalam sistem modern menyebabkan distribusi tidak secepat dan sesederhana pada masa Rasulullah SAW.

Meskipun demikian, jika dibandingkan secara konseptual, kebijakan fiskal modern yang dijalankan BAZNAS Tapanuli Selatan menunjukkan kesinambungan nilai dengan kebijakan fiskal Rasulullah SAW, terutama dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan. Perbedaan yang muncul lebih bersifat struktural dan kontekstual, bukan prinsipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dibangun atas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan melalui instrumen fiskal seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai alat redistribusi, stabilisasi ekonomi, dan penopang kesejahteraan masyarakat, dengan mekanisme pengumpulan dan distribusi yang sederhana, cepat, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip fiskal ini menegaskan bahwa kebijakan publik dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Studi kasus di BAZNAS Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW masih relevan dan diadaptasi dalam konteks modern melalui mekanisme pengumpulan zakat berbasis UPZ, pemanfaatan teknologi digital, serta pergeseran distribusi zakat ke arah produktif. Meskipun demikian, implementasi kebijakan fiskal modern masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, belum optimalnya evaluasi dampak kesejahteraan mustahik, serta keterbatasan responsivitas akibat birokratisasi. Dengan

demikian, relevansi kebijakan fiskal Rasulullah SAW bersifat nilai dan prinsip, sementara penerapannya memerlukan penguatan struktural dan kultural.

BAZNAS Tapanuli Selatan disarankan untuk memperkuat sistem evaluasi pasca-penyaluran zakat, khususnya pada program zakat produktif, agar dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dapat diukur secara berkelanjutan. Evaluasi berbasis data dan pemantauan berkala penting untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi dan kesadaran zakat masyarakat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, serta pemanfaatan media digital. Digitalisasi pengelolaan zakat perlu terus dikembangkan untuk efisiensi, namun tetap diimbangi dengan pendekatan sosial agar nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ciri kebijakan fiskal Rasulullah SAW tetap terjaga dalam praktik kebijakan fiskal modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, T. N., Sahlan, M., Zainul, M., & Billa, A. (2023). *Integrating Digital Citizenship in Character Education through Interpersonal Communication*. 04(02), 121–131.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). *What is Qualitative in Qualitative Research*. 1, 139–160.
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masrurroh, N. (2024). *The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship*. 2(03), 230–239. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006>
- Peacock, A. (2020). (*Conception, Background, and Correlation*). 08(02), 170–188.
- Putri, M., Zaki, M., & Riau, U. M. (2025). *Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern*.
- Sulaiman, W. (2008). *MODERN APPROACH OF ZAKAT AS AN ECONOMIC AND SOCIAL INSTRUMENT FOR POVERTY ALLEVIATION AND*. 9(April), 105–118.
- Syamsu, N., Ulum, W., & Haekal, A. (2025). *Evolution and Dynamics of Islamic Public Finance in Alleviating Extreme Poverty through Green Economic Development in ASEAN Countries: A Bibliometric Analysis*. 10(2), 317–339.
- Tracy, S. J. (n.d.). *Qualitative Research Methods*.
- Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhurrrazi, R. (2025). *Model of Zakat Community Development Program on Mustahik 's welfare through Sustainable Development Goals Approach*.
- Yin, R. K. (2023). *research question than a*. 11(1), 2016–2019.
- Zakiya, F., & Hakim, L. (2025). *Analysis of Zakat and Tax Compliance and its Implications for Indonesia 's Fiscal Policy*. 3(1), 261–269.